



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Menteri berdasarkan Surat Presiden No. R-44/ Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	19 (sembilan belas)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 17 Juli 2019
W a k t u	:	Pukul 10.25 s.d 12.55 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ FGerindra). 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ FPD)
Sekretaris Rapat	:	Anita Handayaniputri, S.T., M.T. (Plh. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018
Hadir	:	dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI; 1. Menteri Perindustrian beserta jajarannya; 2. Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden No. R-44/ Pres/09/2017 beserta jajarannya; 3. Kepala BKPM beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden No. R-44/ Pres/09/2017, serta RDP dengan Kepala BKPM dibuka pada pukul 10.25 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja adalah membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018, berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor: AG/09713/DPR RI/ VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 hal Penyampaian Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden No. R-44/ Pres/09/2017, serta Kepala BKPM untuk menjelaskan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan atas penjelasan Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden No. R-44/ Pres/09/2017, serta Kepala BKPM.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sampai 31 Desember 2018 (*Audited*) sebesar Rp2.628.110.102.894,00 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar seratus sepuluh juta seratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 92,28% dari pagu anggaran Rp2.847.922.836.000,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sudah melampaui persentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya tindak lanjut Kementerian Perindustrian dalam menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Perindustrian terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp227.448.357.037,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau 92,1% dari pagu sebesar Rp247.041.755.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sudah melampaui persentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang telah menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

C. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp480.686.624.859,00 (empat ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau mencapai 87,68% dari pagu sebesar Rp548.229.840.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tidak terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.55 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**H. DITO GANINDUTO, M.B.A.
A-278**